

APBD 2026

2025

Perda Kab. Kulon Progo No. 12, LD 2025/12, 8 HLM

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK	:	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
		-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai APBD 2026 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. - Pendapatan Daerah bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. - Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. - APBD 2026 yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. - Anggaran belanja operasi yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja subsidi; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan social. - Anggaran belanja modal yang terdiri atas: a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset lainnya. - Anggaran belanja transfer yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan. - Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
CATATAN	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 29 Desember 2025.